

WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 100.3.3.3/**7.1.93**/Wk-Pyk/2024

TENTANG

PENETAPAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per-satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, dimana rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun disusun berdasarkan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk setiap jenjang jabatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan hasil Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan

Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62);
12. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
13. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KEDUA : Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dipergunakan sebagai:

a. pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian pada Perangkat Daerah; dan
b. sebagai pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai, syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan.

KETIGA : Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdapat dalam aplikasi https://perencanaan-siasn.bkn.go.id/ dan http://anjababk-simona.kemendagri.go.id/.

KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dapat dilakukan setiap tahun sebagai evaluasi terhadap hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan tahun sebelumnya.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku;

1. Nomenklatur Pelaksana PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah masih berlaku sampai ditetapkannya surat keputusan Wali Kota Payakumbuh tentang Penetapan Jabatan Pelaksana.
2. Keputusan Wali Kota Nomor 060.5/282/Wk-Pyk/2023 tentang Penetapan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,

JASMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat c/q Kepala Biro Organisasi di Padang
4. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Payakumbuh di Payakumbuh

PETA JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kls 14

SEKRETARIS
Kls 12

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	Kls	B	K	-/+
JF Pembina Jasa Konstruksi Madya	12	0	2	-2
JF Pengelola Sumber Daya Air Madya	12	0	2	-2
JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Madya	12	0	2	-2
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemu	12	0	1	-1
JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Madya	12	0	2	-2
JF Penata Ruang Madya	11	0	3	-3
JF Perencana Madya	12	0	2	-2

KEPALA UPTD ALAT BERAT
Kls 9

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD ALAT BERAT
Kls 8

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penata Layanan Operasional	7	0	2	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Operator Alat Berat	5	0	3	-3
Operator Layanan Operasional	5	0	2	-2
Pengelola Umum Operasional	1	0	2	-2

KEPALA UPTD LABORATORIUM KONTRUKSI
Kls 9

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHALABORATORIUM KONTRUKSI
Kls 8

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Mutu Konstruksi	7	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Operator Laboratorium	6	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	0	5	-5
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	2	3	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	4	-3

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
JF Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0	1	-1
JF Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	3	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	1	3	-2

Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF Perencana Muda	10	1	3	-2
JF Perencana Pertama	8	0	3	-3
JF Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	7	-6
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

KEPALA BIDANG BINA MARGA
Kls 11

Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Muda	10	3	8	-5
JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Pertama	8	1	4	-3
JF Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir	7	0	1	-1
JF Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	0	2	-2
JF Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula	5	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	13	-11
Pengelola Layanan Operasional	6	1	7	-6
Operator Layanan Operasional	5	0	9	-9
Pengelola Umum Operasional	1	0	2	-2

KEPALA BIDANG SDA
Kls 11

Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF Pengelola Sumber Daya Air Muda	10	2	6	-4
JF Pengelola Sumber Daya Air Pertama	8	3	7	-4
JF Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	6	0	3	-3
JF Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	4	-3
Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	2	2	0
Operator Pengelola Sumber Daya Air	6	0	3	-3
Pengelola Layanan Operasional	6	0	6	-6
Petugas Operasi Dan Pemeliharaan	5	0	13	-13
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	3	5	-2
Operator Layanan Operasional	5	3	12	-9
Pengelola Umum Operasional	1	0	4	-4

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
Kls 11

	Jabatan	Kls	B	K	-/+
v	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Muda	10	0	1	-1
v	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	10	0	1	-1
v	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	8	1	3	-2
v	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Muda	10	1	3	-2
v	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Pertama	8	0	4	-4
	JF Penata Ruang Pertama	8	0	1	-1
	JF Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	6	0	3	-3
	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan	6	0	1	-1
	JF Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	2	-2
	Penata Layanan Operasional	7	2	5	-3
	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
	Pengawas Jaringan Utilitas	7	2	3	-1
	Pengelola Layanan Operasional	6	1	3	-2
	Operator Layanan Operasional	5	0	13	-13

KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
Kls 11

Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF Penata Ruang Muda	9	2	4	-2
JF Penata Ruang Pertama	8	1	4	-3
JF Surveyor Pemetaan Pertama	8	0	3	-3
JF Surveyor Pemetaan Terampil	7	0	2	-2
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	7	-7
Penata Layanan Operasional	7	0	3	-3
Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	6	0	1	-1
Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	1	6	-5

KEPALA SEKSI PERTANAHAN
Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF Penata Pertanahan Pertama	8	0	2	-2
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	0	1	-1

KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN
Kls 11

Jabatan	Kls	B	K	-/+
JF Perencana Muda	10	1	2	-1
JF Pembina Jasa Konstruksi Muda	10	1	3	-2
JF Pembina Jasa Konstruksi Pertama	8	0	4	-4
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	10	1	3	-2
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	8	1	6	-5
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	4	-3
Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1
Operator Layanan Operasional	5	1	4	-3

PETA JABATAN KELURAHAN SE-KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

KOTA PAYAKUMBUH

LURAH

Kls 9

SEKRETARIS

Kls 8

Jabatan	*Kls*	B	K	-/+
Pengadministrasi Perkantoran	*5*	2	6	-4
Operator Layanan Operasional	*5*	0	6	-6

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM

Kls 8

Jabatan	*Kls*	B	K	-/+
Pamong Pemerintahan	*7*	0	6	-6
Pengolah data dan informasi	*6*	0	6	-6

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Kls 8

Jabatan	*Kls*	B	K	-/+
Pengolah data dan informasi	*6*	0	6	-6

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kls 8

Jabatan	*Kls*	B	K	-/+
Pengolah data dan informasi	*6*	0	6	-6

Pj. WALIKOTA PAYAKUM BUH

JASMAN